



## **BUPATI SUMBA BARAT**

# **P E N G U M U M A N**

NOMOR : BKPSDM.871/818/53.12/8/2024

**Dari : BUPATI SUMBA BARAT**  
**Kepada : Para Pencari Kerja / Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil**  
**Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024**  
**Tanggal : 17 Agustus 2024**

## **ISI PENGUMUMAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dengan ini diumumkan kepada para pencari kerja lowongan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumba Barat, sebagai berikut :

### **A. FORMASI JABATAN**

Jumlah alokasi formasi sebanyak 1.062 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian :

1. Tenaga Kesehatan : 362 formasi
2. Tenaga Teknis : 700 formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dibaca pada lampiran pengumuman ini.

### **B. PERSYARATAN**

#### **1. Persyaratan Umum**

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
- j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

## 2. Persyaratan Khusus

- a. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (sesuai format surat lamaran terlampir);
- b. Surat Pernyataan (sebagaimana format terlampir);
- c. Melampirkan Pasfoto formal terbaru (wajah tampak depan dengan latar belakang warna merah);
- d. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan :
  - Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki Ijasah Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - Pelamar dengan kelulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan sarjana/ diploma adalah sebesar 2,50 (dua koma lima puluh).
- f. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan **Wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), dengan ketentuan :
  - STR wajib masih berlaku pada saat mengajukan lamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR
  - STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.

- g. Bagi pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar pada beberapa jabatan pada Kebutuhan Umum maupun Kebutuhan Khusus (Disabilitas) yang tersedia, dengan syarat :
- Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - Melampirkan Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas-nya;
  - Melampirkan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- h. Wajib melampirkan “Sertifikat Kompetensi Keahlian” bagi jabatan yang mensyaratkan sertifikasi keahlian yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga profesi yang berwenang.
- i. Peserta hanya dapat Mendaftar pada :
- 1 (satu) Formasi Jabatan
  - 1 (satu) unit kerja penempatan
  - 1 (satu) Instansi
- j. Pada saat Mendaftar, pelamar sudah memiliki Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli dari Perguruan Tingginya / Daftar Nilai (Bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi / Sekolah yang bersangkutan)

## C. TATA CARA PENDAFTARAN

### 1. Langkah-langkah Pendaftaran

Untuk panduan, peserta silahkan unduh/buka situs <https://sscasn.bkn.go.id>  
Langkah-langkah umum pendaftaran secara umum dan garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Pelamar membuat akun melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- b. Pada saat membuat Akun, pelamar mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan data diri sesuai KTP untuk dilakukan validasi secara sistem melalui sistem Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;
- c. Memasukkan data diri untuk pembuatan AKUN pelamar, termasuk pengisian Password dan Swafoto (Password jangan sampai lupa);
- d. Setelah Akun selesai dibuat, peserta LOGIN menggunakan NIK dan Password yang sudah dibuat pada tahap Pembuatan Akun;
- e. Lakukan pengisian data diri (Biodata) sesuai permintaan. Khusus untuk pelamar yang Penyandang Disabilitas, silahkan menandai jenis Disabilitas yang dimiliki lalu isi link video unggah sesuai dengan persyaratan. Video dapat diunggah melalui situs video streaming Youtube atau Google Drive/Dropbox/Onedrive/dsb (pastikan video diset **publik** agar bisa dilihat oleh panitia).
- f. Milih formasi jabatan yang akan dilamar..
- g. Khusus pelamar Tenaga Kesehatan Wajib mengisi Nomor STR pada pada formulir. Nomor STR akan divalidasi melalui sistem Web Service Kementerian Kesehatan.

- h. Lakukan proses unggah dokumen WAJIB dan OPSIONAL yang dipersyaratkan sesuai dengan ukuran maksimum berkas dan formatnya.
- i. Silahkan baca petunjuk dan persyaratan serta mengunggah dokumen sebagaimana petunjuk pada sscasn.
- j. Bagi semua pelamar, diharapkan TELITI kembali syarat-syarat pendaftaran sebelum mengakhiri pendaftaran dan melakukan pengiriman data pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>, karena data yang telah kirim tidak dapat diperbaiki kembali.

## 2. Dokumen Yang Diunggah

Setiap dokumen persyaratan Wajib hasil SCAN dari dokumen ASLI serta dapat terlihat/terbaca dengan jelas, kemudian diunggah pada setiap tahapan unggah dokumen di SSCASN dengan format ukuran dan format berkas sesuai dengan ketentuan/persyaratan.

## D. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi hanya dilakukan bagi pelamar yang sudah mengakhiri pendaftaran pada portal SSCASN. Bagi pelamar yang belum mengakhiri pendaftaran sampai batas waktu pendaftaran, maka data pendaftaran tidak terekam.
2. Pada tahap seleksi administrasi, Panitia akan mengecek data yang diunggah pelamar dan melakukan pencocokan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.
3. Hasil tahapan seleksi administrasi akan diumumkan setelah tahapan pendaftaran selesai.
4. Bagi pelamar yang “Memenuhi Syarat (**MS**)” dapat mengikuti ujian seleksi berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*.
5. Bagi pelamar yang “Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**)” dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan dapat diajukan melalui SSCASN.
6. Panitia instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar.
7. Panitia instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
8. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi administrasi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## E. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

## F. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara daring / *online* terhitung mulai tanggal :

**20 Agustus s/d 6 September 2024** jam 23.59 Wita melalui portal :  
<https://sscasn.bkn.go.id>

## G. VERIFIKASI BERKAS

- a) Proses verifikasi berkas/seleksi administrasi dilaksanakan sejak tanggal :  
**20 Agustus 2024 s/d 13 September 2024**
- b) Tim Verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat-syarat pendaftaran yang telah ditetapkan.

## H. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

**Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi** bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan pada Tanggal **14 s/d 17 September 2024**

## **I. KONFIRMASI PENGGUNAAN NILAI SELEKSI SKD TAHUN ANGGARAN 2023 OLEH PESERTA**

Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta dilaksanakan terhitung tanggal **18 s/d 28 September 2024**

## **J. MASA SANGGAH**

Waktu pengajuan sanggah terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi mulai berlaku sejak **tanggal 18 September s/d 20 September 2024**

## **K. PENGUMUMAN PASCA MASA SANGGAH**

Pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah akan dilaksanakan pada **tanggal 21 September s/d 27 September 2024**

## **L. TEMPAT SELEKSI**

Gedung : Ruang CAT Mandiri Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Kabupaten Sumba Barat  
Alamat : Jalan Weekarou – Kec. Loli

## **M. WAKTU SELEKSI**

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan disampaikan kemudian.

## **N. KETENTUAN WAKTU SELEKSI/UJIAN**

- a. Pada saat pelaksanaan Test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian Kemeja berwarna Putih (lengan panjang/lengan pendek), Celana/Rok berwarna gelap dan bersepatu.
- b. Membawa KTP Asli bukan fotocopy
- c. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopy

## **O. SISTEM KELULUSAN**

1. Kelulusan Seleksi Administrasi  
Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian pendidikan yang dipersyaratkan.
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)  
Kelulusannya didasarkan pada nilai *Passing Grade* (Nilai Ambang Batas) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024
3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)  
Kelulusannya didasarkan pada nilai *Passing Grade* (Nilai Ambang Batas) sebagaimana diatur dalam PERMENPAN & RB yang akan diumumkan selanjutnya.
4. Kelulusan Akhir  
Ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang nilainya paling tinggi sebagaimana diatur dalam PERMENPAN & RB.

## P. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang menyampaikan data PALSU dan tidak benar pada saat melakukan pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian serta akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **Gugur**.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Seluruh pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dipungut biaya (Gratis).
6. Hal-hal lain yang belum jelas berkaitan dengan pengumuman ini dapat menghubungi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat untuk mendapat penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian.



**BUPATI SUMBA BARAT,**

**YOHANIS DADE, SH**

Lampiran 1

NOMOR : -  
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS  
HAL : LAMARAN MENGIKUTI SELEKSI  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPADA  
Yth. PANITIA SELEKSI ASN  
KAB. SUMBA BARAT TAHUN 2024  
DI -  
WAIKABUBAK

CONTOH SURAT LAMARAN

DENGAN HOMAT,  
SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI,

NAMA LENGKAP : .....  
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : .....  
N I K : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
AGAMA : .....  
PENDIDIKAN : .....  
JURUSAN : .....  
IPK : .....  
ASAL SEKOLAH : .....  
JAB. FORMASI YANG DILAMAR : .....  
ALOKASI PENEMPATAN : .....  
ALAMAT : .....  
NO TELP./HP : .....  
EMAIL : .....

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN, KIRANYA DIPERKENANKAN  
UNTUK MENGIKUTI TESTING CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024.

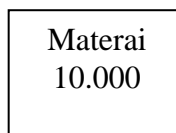
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

1. SCAN ASLI IJASAH TERAKHIR;
2. SCAN ASLI TRANSKRIP NILAI;
3. SURAT PERNYATAAN;
4. SCAN ASLI SURAT TANDA REGISTRASI (Bagi Tenaga Kesehatan);
5. KARTU TANDA PENDUDUK;
6. PAS PHOTO BERWARNA LATAR BELAKANG MERAH.

DEMIKIAN LAMARAN INI SAYA SAMPAIKAN, SEBELUM DAN SESUDAHNYA  
SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

....., ..... 2024

PEMOHON,



NAMA JELAS

## Lampiran 2

**ANAK LAMPIRAN 4**  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih ;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah) ;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Waikabubak, ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai  
10.000

.....

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/ Tanggal Lahir : .....

Pendidikan : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa, saya bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 dan tidak akan mengajukan permohonan pindah. Apabila saya mengajukan permohonan pindah sebelum batas waktu yang telah ditetapkan maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Waikabubak, ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai  
10.000

.....



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	362	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
4.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
5.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
6.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
7.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
8.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
9.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
10.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
11.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
12.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
13.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
14.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
15.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
16.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
17.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
18.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
19.	APOTEKER AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
20.	APOTEKER AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
21.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
22.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
23.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
24.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
25.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
26.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
27.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
28.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
29.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
30.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
31.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
32.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
33.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
34.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
35.	BIDAN AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
36.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
37.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
38.	BIDAN TERAMPIL	8	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
39.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEEKAROU
40.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
41.	BIDAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
42.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
43.	BIDAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
44.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
45.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
46.	BIDAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN   SEKSI MUTU, ETIKA, PROFESI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
47.	BIDAN TERAMPIL	15	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
48.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
49.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
50.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
51.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
52.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
53.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
54.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
55.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
56.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
57.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
58.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
59.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
60.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
61.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
62.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
63.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
64.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
65.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
66.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
67.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
68.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
69.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
70.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
71.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
72.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
73.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
74.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
75.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
76.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
77.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
78.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
79.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
80.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
81.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
82.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
83.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
84.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
85.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
86.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
87.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
88.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
89.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
90.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
91.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
92.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
93.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
94.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
95.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
96.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
97.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
98.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
99.	PERAWAT AHLI PERTAMA	16	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
100.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
101.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
102.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
103.	PERAWAT AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
104.	PERAWAT AHLI PERTAMA	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN   SEKSI MUTU, ETIKA, PROFESI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
105.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
106.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
107.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
108.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
109.	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
110.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
111.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
112.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
113.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
114.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
115.	PERAWAT TERAMPIL	22	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
116.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
117.	PERAWAT TERAMPIL	35	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN   SEKSI MUTU, ETIKA, PROFESI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
118.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			PUSKESMAS LOLO WANO
119.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
120.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
121.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
122.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
123.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
124.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
125.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
126.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
127.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
128.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
129.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
130.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
131.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEEKAROU
132.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
133.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
134.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
135.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
136.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
137.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
138.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
139.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
140.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
141.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
142.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
143.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
144.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
145.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
146.	RADIOGRAFER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
147.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
148.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
149.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
150.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
151.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
152.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
153.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
154.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI
155.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
156.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
157.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
158.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
159.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
160.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
161.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
162.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
163.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
164.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
165.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
166.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
167.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
168.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
169.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
170.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KABUKARUDI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		700	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV DESTINASI PARIWISATA ; D-IV PARIWISATA BAHARI ; S-1 PARIWISATA ; S-1 KEWIRUSAHAAN ; D-IV DESAIN MEDIA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 PENDIDIKAN SEJARAH ; S-1 SEJARAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK WISATA
2.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; D-IV ANIMASI ; S-1 HUKUM ; D-IV DESAIN MEDIA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SEJARAH ; S-1 KEWIRUSAHAAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMASARAN DAN PENYULUHAN WISATA
3.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV PARIWISATA ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK WISATA
4.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV PARIWISATA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMASARAN DAN PENYULUHAN WISATA
5.	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
6.	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN BUDIDAYA ; D-IV AKUAKULTUR ; D-IV SUMBER DAYA AKUATIK ; S-1 PERIKANAN BUDIDAYA ; D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
7.	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 EKONOMI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8.	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	S-1 SAINS DATA ; S-1 SAINS DATA SPASIAL ; S-1 SAINS INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
10.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
11.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ; S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
12.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 HUKUM ; S-1 STATISTIKA ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
13.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PSIKOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
14.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
15.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 HUKUM ; S-1 STATISTIKA ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
17.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
18.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
19.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS
20.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV DESTINASI PARIWISATA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK WISATA
21.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN TERMINAL
22.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN
23.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
24.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
25.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSBUD DAN AGAMA
26.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PAJAK DAERAH I
27.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
28.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
29.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH
30.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PAJAK DAERAH II
31.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
32.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
33.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
34.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI ; D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN TERMINAL
35.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
36.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
37.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS
38.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSBUD DAN AGAMA
39.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK WISATA
40.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
41.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
42.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
43.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
44.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 SAINS POLITIK ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
45.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
46.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
47.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA		PENGEMBANGAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN ASN
48.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
49.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH
50.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
51.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
52.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PAJAK DAERAH II
53.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN SMP
54.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG KETAHANAN PANGAN
55.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
56.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG ANGGARAN
57.	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL	D-III PERIKANAN ; D-III KELAUTAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
58.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
59.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
60.	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PERTANIAN ; D-IV TEKNIK PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU TANAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG SARANA DAN PRASARANA
61.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
62.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN
63.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
64.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
65.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
66.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
67.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
68.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK		SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
69.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
70.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
71.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
72.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
73.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
74.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN ASN
75.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; S-1 KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN
76.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
77.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
78.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI NIAGA ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III KEARSIPAN ; D-III PENYULUHAN KEHUTANAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
79.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS ; D-III KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
80.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN ; D-III KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN ; D-III SEKRETARIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
81.	ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III BAHASA INDONESIA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
82.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL	9	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
83.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 PERTANIAN	10	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
84.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN	10	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
85.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;	10	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
86.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HUKUM	9	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V
87.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
88.	EDUKATOR	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SENI MURNI ; S-1 ILMU SEJARAH ; S-1 SENI PERTUNJUKAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL   SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
89.	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENDATAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
90.	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG LAYANAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOV)
91.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	8	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
92.	OPERATOR ALAT BERAT	PAKET C ; SLTA SEDERAJAT ; SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPTD PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN SAMPAH
93.	OPERATOR ALAT BERAT	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPTD PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN SAMPAH
94.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK
95.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SEJARAH ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SENI MURNI ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN
96.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 SENI MUSIK ; S-1 SENI TARI ; S-1 SENI RUPA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN
97.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
98.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI KESEJAHTERAAN
99.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI PEMERINTAHAN
100.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI PEMERINTAHAN
101.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
102.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI KESEJAHTERAAN
103.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SAINS POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI KESEJAHTERAAN
104.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI PEMERINTAHAN
105.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI PEMERINTAHAN
106.	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK		
107.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
108.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI KESEJAHTERAAN
109.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
110.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI KESEJAHTERAAN
111.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI KESEJAHTERAAN
112.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
113.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
114.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI PEMERINTAHAN
115.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III TEKNISI MEDIS VETERINER ; D-III KESEHATAN HEWAN ; D-III KESEHATAN TERNAK ; D-III PARAMEDIK VETERINER ; D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
116.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
117.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
118.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
119.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
120.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
121.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI SOSIAL
122.	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN ; S-1 PENDIDIKAN KEPERLATIHAN OLAHRAGA ; S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
123.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
124.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
125.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG JASA KONSTRUKSI
126.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 DESAIN INTERIOR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
127.	PENATA KELOLA BANGUNAN	D-IV PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
128.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG BINA MARGA
129.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN ; D-IV ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KELAUTAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP
130.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV ILMU PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN ; D-IV ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KELAUTAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
131.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AGROBISNIS PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; D-IV ILMU PERIKANAN ; D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN ; D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
132.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AGROBISNIS PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; D-IV PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
133.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 FARMASI ; S-1 FARMASI KLINIS ; D-IV ANALIS KESEHATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
134.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
135.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
136.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
137.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
138.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
139.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
140.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
141.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
142.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI PEMERINTAHAN
143.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN DIRA TANA   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
144.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUAK   KANTOR KELURAHAN WAILIANG   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
145.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI PELAYANAN PUBLIK
146.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
147.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN WEE DABBO   SEKSI PEMERINTAHAN
148.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
149.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
150.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN WEEKAROU   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
151.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI PELAYANAN PUBLIK
152.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KOMERDA   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
153.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI KESEJAHTERAAN
154.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KOMERDA   SEKSI PEMERINTAHAN
155.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI PELAYANAN PUBLIK
156.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN DIRA TANA   SEKSI PEMERINTAHAN
157.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN WEE DABBO   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
158.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI PEMERINTAHAN
159.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN SOBAWAWI   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
160.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI PEMERINTAHAN
161.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI KESEJAHTERAAN
162.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN MALITI   SEKSI PEMERINTAHAN
163.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN DIRA TANA   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
164.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI KESEJAHTERAAN
165.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
166.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI PEMERINTAHAN
167.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI PELAYANAN PUBLIK
168.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KAMPUNG BARU   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
169.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN PADA EWETA   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
170.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KAMPUNG BARU   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
171.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN PADA EWETA   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
172.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI PEMERINTAHAN
173.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN SOBAWAWI   SEKSI PEMERINTAHAN
174.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
175.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI PELAYANAN PUBLIK
176.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI KESEJAHTERAAN
177.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN WEEKAROU   SEKSI PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
178.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
179.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI KESEJAHTERAAN
180.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
181.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
182.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN WAILIANG   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
183.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN LODA PARE   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
184.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KAMPUNG SAWAH   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
185.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN LODA PARE   SEKSI PEMERINTAHAN
186.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMERINTAHAN DESA
187.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KOMERDA   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
188.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI PELAYANAN PUBLIK
189.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN MALITI   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
190.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI PEMERINTAHAN
191.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN WAILIANG   SEKSI PEMERINTAHAN
192.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
193.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KAMPUNG BARU   SEKSI PEMERINTAHAN
194.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
195.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KAMPUNG SAWAH   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
196.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN WEE DABBO   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
197.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI KESEJAHTERAAN
198.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN SOBAWAWI   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
199.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
200.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN KAMPUNG SAWAH   SEKSI PEMERINTAHAN
201.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN MALITI   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
202.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKRETARIAT KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
203.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN LODA PARE   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
204.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   KANTOR KELURAHAN PADA EWETA   SEKSI PEMERINTAHAN
205.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   KANTOR KELURAHAN WEEKAROU   SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
206.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
207.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SAINS KELAUTAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
208.	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	D-IV PERTANAHAN ; D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN ; D-IV TEKNIK GEODESI ; S-1 GEOLOGI ; S-1 HUKUM ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERTANAHAN
209.	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV GEOLOGI ; D-IV TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERTANAHAN
210.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
211.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 SAINS LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERENCANAAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
212.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA BANGUNAN GEDUNG
213.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA BANGUNAN GEDUNG
214.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; S-1 TEKNIK SIPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
215.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 ARSITEKTUR LANSKAP ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
216.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR LANSKAP ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
217.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
218.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LAHI HURUK
219.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   SEKSI PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
220.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PENGELOLAAN LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
221.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI		KABUKARUDI
222.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANARARA
223.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
224.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMERINTAHAN DESA
225.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA   SUB BAGIAN TATA USAHA
226.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH   SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH
227.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PAJAK DAERAH I   SUB BIDANG PENILAIAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH I
228.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMASARAN DAN PENYULUHAN WISATA
229.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
230.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GAURA
231.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAREKA NDUKU
232.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PUU WERI
233.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PAJAK DAERAH I   SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH I
234.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PADEDEWATU
235.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
236.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
237.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMERINTAHAN DESA
238.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR   SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
239.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEEKAROU
240.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLO WANO
241.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN   SEKSI PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
242.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT DINAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		TEKNIK KOMPUTER		PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   SUB BAGIAN TATA USAHA
243.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MALATA
244.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH   SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH
245.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
246.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
247.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI ; D-IV PSIKOLOGI ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV EKONOMI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU SOSIOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
248.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
249.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
250.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
251.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III GEOLOGI ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK GEOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR
252.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK PENGAIRAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR
253.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
254.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
255.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 HUKUM BISNIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
256.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK SIPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
257.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERTANAHAN
258.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV GEOGRAFI ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERTANAHAN
259.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG
260.	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERDAGANGAN
261.	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 FISIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK FISIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERDAGANGAN
262.	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG SARANA DAN PRASARANA
263.	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN ; D-IV PENYULUH PETERNAKAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		NUTRISI DAN PAKAN TERNAK ; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN		HEWAN   BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
264.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI ; D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNIK LISTRIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
265.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV TEKNIK LISTRIK ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
266.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
267.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 HUKUM ; S-1 USAHA KOPERASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG KOPERASI
268.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 PENDIDIKAN KOPERASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
269.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN KOPERASI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI KOPERASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG KOPERASI
270.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI ; S-1 USAHA KOPERASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
271.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
272.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3
273.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRONOMI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ILMU TANAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG TANAMAN PERKEBUNAN
274.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG TANAMAN PERKEBUNAN
275.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; D-IV PERTANIAN ; S-1 AGROBISNIS ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
276.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V
277.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
278.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
279.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
280.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
281.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI DARAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL   SEKSI BINA LALU LINTAS
282.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN TERMINAL   SEKSI BINA ANGKUTAN DAN TEKNIK TERMINAL
283.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI DARAT ; D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL   SEKSI PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS
284.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI DARAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN TERMINAL   SEKSI BINA ANGKUTAN DAN TEKNIK TERMINAL
285.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN TERMINAL   SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
286.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
287.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III PARIWISATA ; D-III PERJALANAN WISATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT   SUB BAGIAN PROTOKOL
288.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III PERHOTELAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT   SUB BAGIAN PROTOKOL
289.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN ; D-III KELAUTAN ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP
290.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN ; D-III AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-III MEKANISASI PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
291.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III FISIOTERAPI ; D-III FARMASI ; D-III ANALIS KESEHATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
292.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III GIZI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
293.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AKUPUNTUR ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
294.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III GIZI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
295.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ILMU PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
296.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
297.	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP
298.	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; D-IV PENYULUH PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP
299.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR
300.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR
301.	PENGEMBANG BUKU ELEKTRONIK	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN
302.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERENCANAAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
303.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 BIOLOGI ; S-1 KIMIA ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 FISIKA ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
304.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL	D-III PERLINDUNGAN TANAMAN ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG TANAMAN PERKEBUNAN
305.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
306.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ILMU PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
307.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
308.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG KELEMBAGAAN, PELATIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
309.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG KELEMBAGAAN, PELATIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
310.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 KEHUTANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
311.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

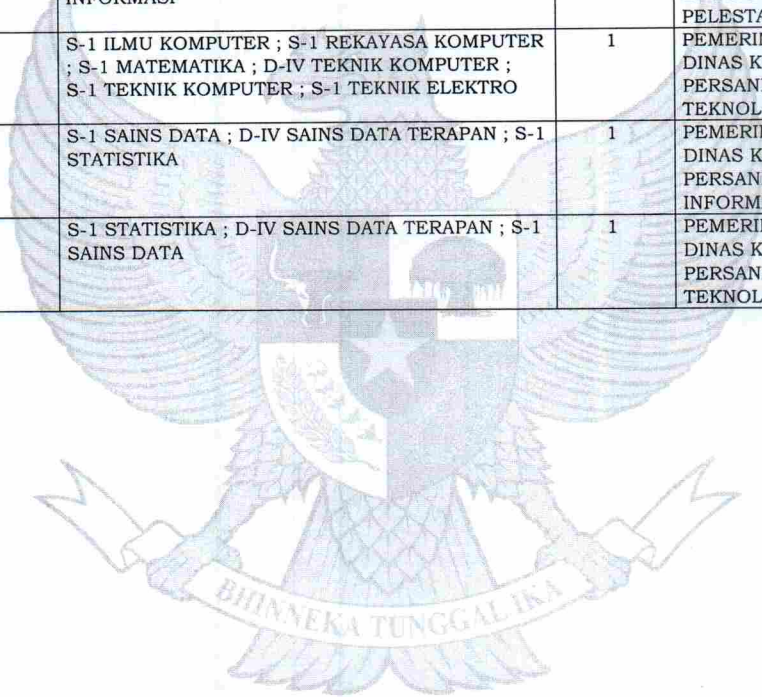
NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		MASYARAKAT ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK ELEKTRO		DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
312.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
313.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 REKAYASA INDUSTRI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERINDUSTRIAN
314.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK ; S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
315.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN ; S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PETERNAKAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-IV KESEHATAN HEWAN ; S-1 PERKEBUNAN ; D-IV PETERNAKAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 AGRONOMI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN	9	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG PENYULUHAN
316.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN ; S-1 PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
317.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	12	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG PENYULUHAN
318.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; D-III ILMU TANAH ; D-III PERKEBUNAN ; D-III PETERNAKAN	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG PENYULUHAN
319.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III TEKNIK PERTANIAN	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   BIDANG PENYULUHAN
320.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI SOSIAL
321.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
322.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
323.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
324.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
325.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
326.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN TERPADU	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN
327.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
328.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
329.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
330.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
331.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				PERLINDUNGAN ANAK
332.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
333.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU SOSIOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
334.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU EKONOMI ; S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG EKONOMI
335.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
336.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
337.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
338.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
339.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU STATISTIK ; S-1 ILMU STATISTIKA ; S-1 STATISTIK ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
340.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI BISNIS ; S-1 BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
341.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
342.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ILMU PENDIDIKAN ; S-1 PENDIDIKAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
343.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
344.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; D-IV DESTINASI PARIWISATA ; S-1 EKONOMI ; S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN ; S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN
345.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 KOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA ; S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
346.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
347.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 STATISTIK ; S-1 ILMU STATISTIK ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
348.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
349.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 HUKUM ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG EKONOMI
350.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT   SEKRETARIAT INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT
351.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU SOSIOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK DAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 MANAJEMEN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
352.	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
353.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	10	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
354.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 PENDIDIKAN JASMANI	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
355.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 JURNALISTIK ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 KEHUTANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
356.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG LAYANAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOV)
357.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 KEHUTANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
358.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 KEHUTANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
359.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
360.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
361.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG INFRASTRUKTUR DAN POTENSI WILAYAH
362.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LAMBOYA   SEKSI PEMERINTAHAN
363.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN WANOKAKA   SEKSI PEMERINTAHAN
364.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN TANA RIGHU   SEKSI PEMERINTAHAN
365.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LOLI   SEKSI PEMERINTAHAN
366.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN LABOYA BARAT   SEKSI PEMERINTAHAN
367.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 RANCANG KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG INFRASTRUKTUR DAN POTENSI WILAYAH
368.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK   SEKSI PEMERINTAHAN
369.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN
370.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG LAYANAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOV)
371.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
372.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
373.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
374.	PRANATA KOMPUTER AHLI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA	; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. SUMBA BARAT
375.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
376.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
377.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS SOSIAL   BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
378.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG ANGGARAN
379.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN
380.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
381.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG EKONOMI
382.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
383.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
384.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN ASN
385.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
386.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMASARAN DAN PENYULUHAN WISATA
387.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
388.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
389.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
390.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
391.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
392.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
393.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
394.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
395.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
396.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
397.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
398.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT
399.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN
400.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
401.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PENGELOLAAN LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
402.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 MATEMATIKA ; D-IV TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
403.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 SAINS DATA ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
404.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 SAINS DATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK   BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA



panrb